



Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam

E-ISSN: 2715-9477, P-ISSN: 2751-954X

Volume 02 Issue 02, 21 Juli 2021

Journal Page is available to:

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>

Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Dan Kualitas Auditor Internal Terhadap Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

Rosidah Kurniawati^{1*}, Gayuh Musonef²

^{1,2*}Student at Master of Management Airlangga University, Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05-07-2021

Revised 07-07-2021

Accepted 07-07-2021

Available 21-07-2021

Revised (1) 23-07-2022

Accepted 30-07-2022

Revised Available 31-07-2022

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Kualitas Auditor, Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Paper type: Research paper

Please cite this article: Rosidah Kurniawati & Gayuh Musonef. "Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Dan Kualitas Auditor Internal Terhadap Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik" Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam [ONLINE], Volume 02 Number 02 (Juli 21, 2021)

Cite this document:

Al-Mal 2th edition

***Corresponding author**

e-mail: rosie.kurniawati@gmail.com

Page: 209-228

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai apakah penerapan pengendalian internal dan kualitas auditor internal mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan, metode pendekatan pada penelitian yaitu metode kuantitatif, jumlah sampel yang terpilih dan memenuhi kriteria adalah 32 pegawai, Pengolahan data yang digunakan adalah Smart PLS 3.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada penerapan pengendalian internal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas auditor internal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbatasan pada penelitian ini untuk mengamati tata kelola perusahaan ditentukan oleh variabel penerapan pengendalian internal dan kualitas auditor internal, sehingga masih memungkinkan untuk peneliti yang lain melakukan penelitian terkait dengan tema yang sama dengan menambahkan variabel yang lain yang bisa mempengaruhi tata kelola perusahaan. Implikasi pada penelitian ini untuk melihat bagaimana perusahaan membuat kebijakan tata kelola perusahaan yang akan ditentukan dari penerapan pengendalian internal dan kualitas auditor internal pada perusahaan tersebut, apabila penerapan pengendalian internal dan kualitas auditor internal terlaksana dengan baik, maka akan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Al-Mal with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

ABSTRACT: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding whether the implementation of internal control and the quality of internal auditors have an influence on the implementation of good governance. This research was conducted at the Regional Inspectorate of Magetan Regency, the approach method in this research is the quantitative method, the number of samples selected and meeting the criteria is 32 employees, the data processing used is Smart PLS 3.0. The results of this study prove that there is a significant effect on the implementation of internal control on good governance and the quality of internal auditors on good governance. The limitations of this study to observe corporate governance are determined by the variables of the implementation of internal control and the quality of internal auditors, so it is still possible for other researchers to conduct research related to the same theme by adding other variables that can affect corporate governance. The implications of this study are to see how companies make corporate governance policies which will be determined from the implementation of internal control and the quality of internal auditors in the company, if the implementation of internal control and the quality of internal auditors is carried out properly, it will create good corporate governance.*

Keywords: *Internal Control, Auditor Quality, Good Governance.*

PENDAHULUAN

Konsep GCG biasa disebut dengan *Good Government Governance* (GGG) atau tata kelola pemerintahan yang baik yang mana merupakan suatu bentuk pemerintahan ideal yang mana lembaga negara mampu menjalankan tugasnya guna menyelesaikan masalah publik serta menciptakan hubungan harmonis antar struktur lembaga negara yang nantinya dapat membuat serta merumuskan kebijakan yang terbaik bagi negara dan rakyatnya. Guna mewujudkan serta mengimplementasikan *good governance*, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Dalam publikasi yang diterbitkan oleh sekretariat *Partnership for Governace* (2013) menyebutkan bahwa "*good governance is a concensus reached by government, citiziens and the privat sector for the adminstration of country or state*". Artinya, pemerintahan yang baik itu adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Karena itu, untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan dialog antara pelaku-pelaku penting

dalam negara. Agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

LAN & BPKP (2000) mengemukakan bahwa, arti *Good Governance* mengandung dua pengertian : Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pemabangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Beberapa pendapat lain tentang *Good Governance* diantaranya adalah "OECD dan World Bank mendefinisikan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan." definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Good governance efektif diterapkan di Indonesia pasca meletusnya revolusi orde baru pada tahun 1998 yang melahirkan era reformasi di Indonesia. Era reformasi diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, namun teori tidaklah semudah prakteknya. Transparansi menjadi salah satu aspek yang menentukan gagal atau berhasilnya cita-cita *good governance* di Indonesia. Banyaknya kasus pungutan liar yang terjadi belakangan ini di instansi pemerintahan baik pusat maupun sudah dianggap hal yang biasa saja oleh oknum pelaku bahkan ada sebagian berpikir ada yang kurang apabila tidak berpraktek pungli, tidak sampai disitu bahkan penerimaan pegawai tidak lepas dari praktek pungutan liar yang bisa dikatakan sebagai mahar serta praktek nepotisme yang mengakibatkan

kurangnya kompetensi pegawai sudah mendarah daging, hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa transparansi hanya menjadi slogan saja.

Peranan auditor internal tentunya sangat vital demi mendukung terlaksananya good governance di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tulisan Dhimas Puguh Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa Adanya pelaksanaan audit internal yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan tahap-tahap audit internal, maka akan dapat meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada good *corporate governance*.

Faktor yang kemudian sangat berpengaruh terhadap implementasi good governance di Indonesia adalah *internal control* atau biasa disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Sistem ini yang kemudian menjamin kegiatan tercapai dengan efektif dan efisien.

Rachmawati, Fardinal (2017) menemukan bahwa aktifitas pengendalian berpengaruh pada kualitas sistem informasi akuntansi, maka dengan demikian secara tidak langsung hal tersebut berpengaruh pada kualitas kawajaran dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Karena SPIP ini sifatnya menyeluruh pada setiap kegiatan dan setiap unit pada setiap instansi pemerintah demi untuk mendukung tujuan organisasi, maka dari itu kegagalan atau keberhasilan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan good governance.

Selain kedua faktor yang telah diuraikan di atas yaitu tentang SPIP dan Auditor Internal hal yang kemudian diduga sangat berpengaruh terhadap

penerapan good governance adalah akuntabilitas atau lebih berfokus pada sistem akuntabilitas, bahwasannya hal tersebut searah dengan pernyataan Bryan Maddox (2018) dalam *Accountabilty in Modern Government: what are the issues?* menyatakan bahwa tanpa akuntabilitas yang baik akan resiko bagi kementerian bahwa aktivitasnya menjadi salah sasaran ini dapat menyebabkan inefektifitas dan manajemen uang rakyat yang sangat buruk.

Penelitian Giantini Dini (2014) menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengaruh sebesar 54,8% terhadap penerapan good governance. Sedangkan sisanya sebesar 45,2% merupakan pengaruh faktor lain diluar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seperti kemimpinan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja kebijakan dan pengendalian manajemen.

Dari semua uraian dan penelitian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor audit internal sangat mempengaruhi kualitas manajemen dalam melaksanakan kegiatannya begitu juga dengan *internal control* yang baik makan hal tersebut akan menjadi kegiatan serta program suatu instansi akan lebih efektif serta efisien, kemudian yang ketiga yaitu sistem akuntabilitas yang baik bisa dimungkinkan untuk mendorong transparansi dan serta kualitas laporan pertanggungjawaban manajemen selanjutnya akan menciptakan suatu *good governance*. Bertolak dari rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh kualitas penerapan pengendalian internal terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengkaji pengaruh kualitas auditor internal terhadap tata penerapan kelola pemerintahan yang baik.

1. Teori Kontrak Sosial

Teori ini dikemukakan oleh filsuf Hobbes dan Locke. Hobbes melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya. Mereka tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai. Akan tetapi, Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik dan perang. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya. Mereka seirama untuk mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, negara ideal bagi mereka juga berbeda. Hobbes mendambakan kekuasaan mutlak dan Locke pemisahaan kekuasaan.

Manusia sangat membutuhkan kekuasaan bersama untuk menghindari pertumpahan darah. Kebersamaan tersebut (kontrak atau perjanjian sosial) mendorong manusia untuk membentuk sebuah negara atau kedaulatan (Suhelmi, 2001:176). Hobbes terasa menyadari bahwa manusia setara namun bersifat individual. Mereka menyepakati agar negara memaksa mereka menjadi makhluk sosial. Penguasa diberikan otoritas untuk menciptakan perbedaan dalam masyarakat (Fink, 2010:59). Selain itu, ketika mereka telah bersepakat maka Segala hak mereka berakhir dan harus menaati semua aturan penguasa (Hadiwijono, 1980:34-35). Dengan kata lain, masyarakat melalui negara memiliki peran yang fundamental dalam mengatur interaksi antar manusia. Prinsip Hobbes dalam membangun negara didasarkan pada kekuasaan mutlak (penguasa berkuasa atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Magnis- Suseno (1995:11), kemudian, merangkum asumsi filsafat negara Hobbes, dalam: *“(1) negara harus kuat tanpa tanding sehingga dapat memastikan ketaatan para anggota masyarakat*

terhadap peraturan- peraturannya; dan (2) negara harus menetapkan suatu tatanan hukum bahwa setiap orang yang tidak menaatinya akan dihukum mati”

Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990:2). Teori yang dengan substansi mengarah pada sektor publik ini sesuai untuk digunakan sebagai *grand theory* pada penelitian akuntansi sektor publik.

2. Stewardship Theory

Stewardship didefinisikan oleh Hernandez (2008) sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Ini ada sejauh aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan *stakeholder*. Davis *et al.* (1997) menemukan bahwa seorang pelayan menjaga dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan mengakibatkan fungsi utilitas pelayan dapat dimaksimalkan (Vallejo, 2009).

Stewardship Theory berangkat dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori- teori psikologi dan sosiologi. Dalam pengelolaan *Stewardship Theory* pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama (Anton, 2010). Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007).

Teori ini memandang manajemen sebagai tulang punggung dari keberhasilan perusahaan dimana keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan pengelola dari organisasi itu. Teori ini menemukan bahwa bila kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien maka akan memberikan kepuasan *stakeholder* dan pengelola organisasi. Teori *stewardship* berasumsi terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dari pada perilaku individualism sehingga pihak pengelola dalam hal penelitian ini adalah pemerintah akan melakukan peningkatan kompetensi pegawai yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal, dan menciptakan budaya organisasi yang baik dan kuat serta didukung oleh suatu sistem untuk menghasilkan *good governance*.

3. Definisi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Biasa disebut dengan *Good Government Governance*. Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang baik (BAPENAS, 2008: 9) istilah *good governance* mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. *Asian Development Bank* menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *transparency* (2) *participation* (3) *Ejiciency predictability*, dan (4) *accountability*. Bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi sehingga sebagai langkah awal, instrumen ini akan berusaha untuk menelaah empat prinsip

utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (Sedarmayanti, 2007: 38).

4. Definisi Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA, 2014) meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

5. Definisi Auditor Internal

Audit Internal berfungsi untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance*. Definisi Audit Internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (2011:2) adalah:

“Internal audit is independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps organization accomplish its objectives by bringin a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.

Definisi Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004: “Audit Internal adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, financial, dan kegiatan lainnya, sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan. Pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini pada merupakan penelitian kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antara variable dengan menganalisis data numeric (angka) menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis secara asosiasi. Penelitian ini menggunakan dimensi waktu secara *times series*. Penelitian juga ini menggunakan lingkungan riil dimana unit analisisnya menggunakan industry asuransi yang ada di Indonesia. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang diambil dalam laporan keuangan perusahaan asuransi yang dapat diunduh pada website perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruhnya melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2013). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis struktur modal, premi neto dan profitabilitas terhadap solvabilitas perusahaan asuransi di indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif karena menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian secara angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan pengendalian internal dan kualitas auditor internal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik adapun obyek penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

Pemilihan objek penelitian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan didasari oleh karena Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan merupakan pengawal program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan supaya program dan kegiatan tersebut berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan taat terhadap peraturan perundangasn, kedua Inspektorat sebagai *trigger* (pelatuk) sekaligus pembina dari dalam organisasi dituntut harus sehat secara organisasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden yang menjadi sampel di Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

HASIL DAN KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, sesuai dengan target sampel yang ditetapkan, peneliti menyebarkan sebanyak 43 kuisisioner kepada sampel untuk diisi, sedangkan kuisisioner yang berhasil kembali sejumlah 32 eksemplar atau 74,5 %.

Tabel 1.

Rata-Rata Nilai Kategorisasi

No.	Variabel	Dimensi	Mean	Kategori
1.	Penerapan Pengendalian Internal	Lingkungan Pengendalian	2.883624862	Sebagian Besar
		Penilaian Resiko	2.383264269	Sebagian Kecil
		Aktivitas Pengendalian	2.763834659	Sebagian Besar
		Informasi dan Komunikasi	2.684754395	Sebagian Besar
		Pemantauan	2.385739475	Sebagian Kecil
2.	Kualitas Auditor	Integritas	3.247483474	Sebagian Besar
		Obyektifitas	3.324648305	Sebagian Besar
		Kerahasiaan	3.474953709	Sebagian Besar
		Kompetensi	3.034750835	Sebagian Besar
		Independensi	3.034023845	Sebagian Besar
3.	Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Transparansi	3.089324703	Sebagian Besar
		Kewajaran	2.973927482	Sebagian Besar
		Akuntabilitas	2.803924083	Sebagian Besar
		Responsibilitas	3.189949498	Sebagian Besar

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada bahwa jawaban responden pada masing masing dimensi di setiap variabel adalah sebagian besar atau bisa diartikan yaitu sebagian besar menjawab bahwa pada unsur tersebut sebagian besar telah ada atau dilaksanakan, sementara itu jawaban sebagian kecil hanya pada variabel penerapan pengendalian internal yaitu pada dimensi penilaian resiko dan pemantauan

1. Uji Validitas dan Reliabilitas (Outer Model)

a. Uji Validitas

Berdasarkan nilai *factor loading* diatas, masih terdapat *factor loading* yang nilainya dibawah 0,5. Table 4.4 berikut akan mendeskripsikan *factor loading* untuk masing-masing indikator.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Dimensi	Indicate	Outer L.	Ket.
1	Penerapan Pengendalian Internal (X1)	Lingkungan Pengendalian	X1.1.1	0.825	Valid
2			X1.1.2	0.656	Valid
3			X1.1.3	0.797	Valid
4			X1.1.4	0.899	Valid
5	Aktivitas Pengendalian	Penilaian Resiko	X1.2.1	1.000	Valid
6			X1.3.1	0.739	Valid
7			X1.3.2	0.872	Valid
8			X1.3.3	0.842	Valid
9	Informasi dan Komunikasi	Pantauan	X1.3.4	0.731	Valid
10			X1.4.1	0.922	Valid
11			X1.4.2	0.933	Valid
12			X1.5.1	0.976	Valid
13	Kualitas Auditor Internal (X2)	Integritas	X1.5.2	0.976	Valid
14			X2.1.1	0.856	Valid
15			X2.1.2	0.901	Valid
16			X2.1.3	0.922	Valid
17	Obyektifitas	Kerahasiaan	X2.1.4	0.926	Valid
18			X2.2.1	0.847	Valid
19			X2.2.2	0.897	Valid
20			X2.2.3	0.893	Valid
21			X2.3.1	0.895	Valid

22			X.2.3.2	0.921	Valid
23		Kompetensi	X.2.4.1	0.777	Valid
24			X.2.4.2	0.911	Valid
25			X.2.4.3	0.8661	Valid
26		Independensi	X.2.5.1	1.000	Valid
27	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)	Transparansi	Y.1.1	0.729	Valid
28			Y.1.2	0.744	Valid
29			Y.1.3	0.794	Valid
30			Y.1.4	0.852	Valid
31			Y.1.5	0.754	Valid
32			Y.1.6	0.811	Valid
33		Kewajaran	Y.2.1	0.913	Valid
34			Y.2.2	0.933	Valid
35			Y.2.3	0.825	Valid
36		Akuntabilitas	Y.3.1	0.842	Valid
37			Y.3.2	0.838	Valid
38			Y.3.3	0.885	Valid
39			Y.3.4	0.793	Valid
40		Responsibilitas	Y.4.1	1.000	Valid

b. Pengujian Hipotesis

Berikut tabel yang menjelaskan hubungan antar konstruk (variabele):

Tabel 4.3
Path Coefisien

Hubungan antar variable	Koefisien Para-meter	T statistic	P Value	Ket.
Penerapan Pengendalian Internal > Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	0.227	1.809	0.036	Signifikan
Penerapan Pengendalian Internal > Lingkungan Pengendalian	0.808	12.968	0.000	Signifikan
Penerapan Pengendalian Internal > Penilaian Resiko	0.672	7.793	0.000	Signifikan
Penerapan Pengendalian Internal >	0.907	30.552	0.000	Signifikan

Kegiatan Pengendalian				
Penerapan Pengendalian Internal > Informasi dan Komunikasi	0.914	41.190	0.000	Signifikan
Penerapan Pengendalian Internal > Pemantauan	0.826	16.040	0.000	Signifikan
Kualitas Auditor Internal > Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	0.196	1.730	0.042	Signifikan
Kualitas Auditor Internal > Integritas	0.881	25.879	0.000	Signifikan
Kualitas Auditor Internal > Obyektivitas	0.862	24.639	0.000	Signifikan
Kualitas Auditor Internal > Kerahasiaan	0.845	22.113	0.000	Signifikan
Kualitas Auditor Internal > Kompetensi	0.804	16.145	0.000	Signifikan
Kualitas Auditor Internal > Independensi	0.853	23.884	0.000	Signifikan
Penerapan SAKIP > Evaluasi Internal	0.847	20.945	0.000	Signifikan
Penerapan SAKIP > Pencapaian Sasaran	0.831	12.971	0.000	Signifikan

Dengan jumlah sampel 32 dan variabel 3 maka diperoleh *degree of freedom (df)* sebesar 29 adapun untuk taraf signifikansi 5% = 1.6766 sehingga berdasarkan tabel uji *path koefisien* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel penerapan pengendalian internal memperoleh *t statistic* sebesar 1.809 dimana nilai tersebut lebih dari 1.6766 jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan pengendalian internal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, sementara itu nilai koefisien parameter adalah positif sebesar 0.227 menjelaskan bahwa semakin baiknya tingkat pengendalian internal maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ristanti et al., 2014), (Pane, 2018) dan (R, 2007) yang menyatakan bahwa tingkat pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Darwanis, 2016), (Sholikin & Setiawan, 2018) dan (Supriatna, 2016) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara tingkat pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan yang

baik. Hasil penelitian ini ditunjang pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azlina & Amelia, 2013), (Gusnardi, 2011), (Triadi & Suputra, 2016) dan (Oktari, 2011). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari (Dhiyavani, 2017), (Anni Safitri, 2021) dan (Bhima Azis Usman, 2015) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang baik

- 2) Variabel kualitas auditor memperoleh *t statistic* sebesar 1.730 dimana nilai tersebut lebih dari 1.6766 jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas auditor terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, sementara nilai koefisien parameter adalah positif sebesar 0.196 menjelaskan bahwa semakin meningkatnya kualitas auditor internal maka akan semakin meningkat pula kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2017), (Darlis et al., 2014) dan (Ardi, 2017) yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya kualitas auditor internal maka akan semakin meningkat pula kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan akan mengurangi tingkat terjadinya kecurangan dalam pemerintahan. Dan sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2018) dan (Taufik, 2011) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara kualitas auditor dan tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, pengujian hipotesis dan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan sudah terselenggara dengan baik, namun demikian yang perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan adalah pada unsur penilaian resiko Kualitas Auditor Internal berpengaruh

signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara tugas dan fungsi auditor internal adalah untuk mengawasi, mengawal dan membina program dan kegiatan pada organisasi, dengan auditor internal yang berkualitas otomatis pelaksanaan tugas dan fungsi akan semakin optimal demikian pula hal tersebut berimbas pada level penerapan tata kelola pemerintahan yang baik organisasi yang akan semakin meningkat.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi pada penelitian ini untuk melihat bagaimana perusahaan membuat kebijakan tata kelola perusahaan yang akan ditentukan dari penerapan pengendalian internal dan kualitas auditor internal pada perusahaan tersebut, apabila penerapan pengendalian internal dan kualitas auditor internal terlaksana dengan baik, maka akan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

REFERENSI

- Anni Safitri, K. W. dan R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intrenal, Tata Kelola Perusahaan, dan Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 2(1), 79–89.
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61–80.
- Ardi, M. (2017). Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 169–176. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.433>
- Azlina, N., & Amelia, I. (2013). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 3(1), 44–48.
- Ben Kwame Agyei-Mensah, (2016). Internal control information disclosure and corporate governance: evidence from an emerging market, *Corporate*

Governance, Vol. 16 Iss 1 pp. 79 – 95, *Emerald Insight*

Bhima Azis Usman, T. T. dan M. R. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Ekonomi*, II(4), 1-15.

COSO, 2013, *Internal Control – Integrated Framework : Executive Summary*, Durham, North Carolina, May 2013

Cyprus O. O. Olumbe, 2012. *The Relationship Between Internal Controls And Corporate Governance In Commercial Banks In Kenya*. University Of Nairobi

Darlis, E., Sari, R. N., & Wiliyanti, R. (2014). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(1), 1-15.

Darwanis. (2016). Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi ...*, 5(2), 100-115. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4514%0Ahttp://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/download/4514/3890>

Dhiyavani, S. I. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. *Jom Fekon*, 4(2006), 1-13.

Dr. Zaroug Osman Bilal^[1] Dr. Omar Igbal Twafik^[2] 2018. The Influence of Internal Auditing on Effective Corporate Governance in the Banking Sector in Oman. *European Scientific Journal March 2018*

Dumitrascu Mihaela and Savulescu Iulian, 2012. Internal Control and the Impact on Corporate Governance, in Romanian Listed Companies. IBIMA

Publishing: Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics

Gusnardi. (2011). Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Ekuitas*, 15(1), 130-146.

Hari Setiyawati, 2015. The Effect of internal accountants competence on the quality of financial reporting and the impact on the financial accountanbility. Volume 5. Hal 44-56

IIA. 2011. International Professional Practices Framework. The Institute of Internal Auditor Inc. USA.

IIA, 2013. The Three Lines of Defence in Effective Risk Management and Control. IIA Position Paper

Inaam M. Al-Zwyalif, 2015. The Role of Internal Control in Enhancing Corporate Governance: Evidence from Jordan. Canadian Center of Science and Education: *International Journal of Business and Management*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

James, A. Hall, 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ketiga, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat, Jakarta.

Komarudin, Dan Satmoko, (2009), Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah Domestik, JAI Vol 5 No. 1. 2009.

Laporan Akuntabilitas Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat

Lela Nurlaela Wati, 2018. Metodologi Penelitian Terapan. Bekasi: Pustaka Amri

Oktari, A. N. dan R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Ekonomi*, 19(2), 1-15.

- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Putri, D. S. N., Nangoi, G. B., & ... (2017). Pengaruh Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Clean Government Governance Pada Inspektorat Pemerintah *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...*, 5(2), 836-845. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15999>
- R, A. E. (2007). Pengaruh Badan Pengawasan Daerah Dan Pengendalian Intern Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Computech & Bisnis*, 1(2), 127-136. <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/15>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37-46.
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Sujana, E. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governance (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten tabanan). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-11.
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 35-50. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 941-948. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7716>
- Syafrida, Fardinal, 2017. Pengaruh Aktivitas Pengendalian, Informassi dan Komunikasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan

Dampaknya terhadap Laporan Keuangan. *Profita*: Volume 10, No. 3

Taufik, T. (2011). Pengaruh peran inspektorat daerah terhadap pencegahan kecurangan. *Pekbis Jurnal*, 3(2), 512–520.

Triadi, A. A. L., & Suputra, I. D. G. D. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Manajerial. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 895–920.

Wicaksono, D. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika Auditor, Dan Kecermatan Profesional Pada Kualitas Audit Aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Ri. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(5), 425–437.
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i5.133>